

RENJA 2026



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Tim Penyusun dapat merampungkan perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Ponorogo tahun 2026, sebagai landasan perencanaan kegiatan tahunan guna mendukung terwujudnya perencanaan yang berkualitas, aspiratif, partisipatif, terkendali dan akuntabel, yang disertai penelitian dan pengembangan yang mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah. Kami menyadari bahwa tantangan dan kompleksitas pembangunan yang semakin tinggi memerlukan kerja keras dan sinergi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam Rencana Kerja ini, kami telah menetapkan program dan kegiatan yang komprehensif dan berorientasi pada hasil, yang diharapkan dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Renja ini disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki untuk menjawab tantangan dan permasalahan perencanaan pembangunan dengan paradigma baru yang mengintegrasikan aspirasi masyarakat dan kebutuhan organisasi. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renja tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas perencanaan yang berkelanjutan.

Selanjutnya, kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya dokumen Renja Bapperida Kabupaten Ponorogo tahun 2026 ini, kami sampaikan terima kasih. Akhirnya, semoga segala hal yang tertuang dalam dokumen ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Ponorogo, Agustus 2025
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Ponorogo



Agus Sugiarto
Dr. Agus Sugiarto, M.Si
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 196804131988091002

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR TABEL..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum..... | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan..... | 5 |
| 1.4. Sistematika Penulisan..... | 6 |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... | 11 |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... | 11 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... | 21 |
| 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... | 21 |
| 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... | 25 |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... | 44 |
| BAB III TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... | 46 |
| 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional..... | 46 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... | 47 |
| 3.3 Program dan Kegiatan..... | 48 |
| 3.4 Penentuan Isu – isu Strategis..... | 69 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... | 70 |
| BAB V PENUTUP..... | 80 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---------------------------|----|
| Tabel 2. 1 Format A | 13 |
| Tabel 2. 2 Format B | 21 |
| Tabel 2. 4 Format C | 27 |
| Tabel 2. 5 Format D | 45 |
| Tabel 3. 3 Format E..... | 53 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Renja PD adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja PD disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun tema Pembangunan Kabupaten Ponorogo tahun 2026 adalah Pemantapan Fungsi Pariwisata, Pembinaan Pemuda dan Olah Raga melalui Organisasi Pemuda dan Karangtaruna dan Pembangunan Infrastruktur Dasar, Penguatan dan Mitigasi Bencana serta Perencanaan Tata Ruang yang Berkualitas. Acuan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Ponorogo tahun 2026 adalah Renstra Bapperida Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 dan RKPDP Tahun 2026. Program dan kegiatan dijabarkan dalam matriks yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Bapperida Kabupaten Ponorogo tahun 2026 merupakan:

1. Pedoman bagi Bapperida dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026.
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Bapperida Kabupaten Ponorogo tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Negara Lembaran Negara Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 (8), Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029;

23. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
24. Surat Edaran Bupati Ponorogo Nomor 694 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Bapperida Kabupaten Ponorogo tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang mendukung pencapaian visi, misi, dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025–2029. Renja ini menjadi instrumen penting untuk menjamin keselarasan antara perencanaan tahunan Bapperida Kabupaten Ponorogo dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta program prioritas kepala daerah terpilih. Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Bapperida Kabupaten Ponorogo tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan arah kebijakan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025–2029 ke dalam program dan kegiatan Bapperida Kabupaten Ponorogo Tahun 2026;
2. Menyusun program dan kegiatan yang adaptif dan responsif terhadap isu-isu strategis serta permasalahan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
3. Mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi (KISS) dalam pelaksanaan program pembangunan baik antar perangkat daerah, antar tingkatan pemerintahan, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya;
4. Mendukung pelaksanaan tugas Bapperida sebagai pengendali perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, partisipatif, dan berbasis bukti;
5. Menjamin pemanfaatan sumber daya pembangunan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
6. Menjadi dasar evaluasi dan pengukuran kinerja pelaksanaan pembangunan daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sesuai target tahun berjalan;
7. Menjaga kesinambungan proses pembangunan tahunan agar tetap relevan terhadap perubahan asumsi makro, kebutuhan organisasi, serta dinamika aspirasi masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan Renja Bapperida Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 dan Surat Edaran Bupati Ponorogo Nomor 694 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2026.

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Dilengkapi dengan matriks format A (terlampir).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Dilengkapi dengan matriks format B (terlampir).

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM, dan SDGs (Sustainable Development Goals).
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

Dilengkapi dengan matriks format C (terlampir).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh.
- b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

Dilengkapi dengan matriks format D (terlampir).

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal:
 - Pencapaian visi dan misi kepala daerah
 - Pencapaian SDGs
 - Pengentasan kemiskinan
 - Pencapaian NSPK dan SPM
 - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
 - Pengembangan daerah terisolir
 - Dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu)
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Dilengkapi dengan matriks format E (terlampir)

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (Renja) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra.

Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2026 diperlukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2026. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan;
3. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kabupaten oleh Bapperida dan Narasumber yang kompeten.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat fungsional, dan bimbingan teknis.

Capaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas, pokok dan fungsi Bapperida Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2026 dapat dilihat dengan membandingkan capaian pelaksanaan Rencana Kerja Bapperida Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan target yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029.

Dalam proses pengukuran kinerja, yang perlu diperhatikan adalah membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Bapperida Kabupaten Ponorogo dengan realisasinya dalam

kurun waktu tertentu. Skala yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Format A
Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Ponorogo

Nama Perangkat Daerah: Bapperida Kabupaten Ponorogo

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---------------------|---|--|--|--|---|---|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 5.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana dan prasarana perangkat daerah yang memadai | 90% | 85% | 90% | 97% | 108% | 95% | 92,33% | 102,59% |
| 5.01.01.2.01 | Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu | 90% | 79% | 90% | 95% | 106% | 90% | 88% | 97,78% |
| 5.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 3 Dokumen | 300% |
| 5.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 3 Laporan | 300% |
| 5.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Prosentase dokumen pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu | 90% | 95% | 90% | 95% | 106% | 90% | 93,33% | 103,70% |
| 5.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 67 Orang/Bulan | 67 Orang/Bulan | 67 Orang/Bulan | 67 Orang/Bulan | 100% | 37 Orang/Bulan | 171 Orang/Bulan | 255,22% |
| 5.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100% | 3 Dokumen | 9 Dokumen | 300% |
| 5.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Prosentase disiplin dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur yang terpenuhi | 90% | 80% | 90% | 99% | 110% | 90% | 89,67% | 100% |
| 5.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 65 Paket | 65 Paket | 65 Paket | - | - | 65 Paket | 130 Paket | 200% |

Tabel 2. 1 Format A
Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Ponorogo

Nama Perangkat Daerah: Bapperida Kabupaten Ponorogo

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---------------------|--|--|--|--|---|---|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 5.01.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 65 Orang | - | 65 Orang | 85 Orang | 100% | 12 Orang | 97 Orang | 149,23% |
| 5.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase administrasi perkantoran sesuai SOP | 95% | 99% | 95% | 103% | 108% | 95% | 99% | 104,21% |
| 5.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 79 Paket | 75 Paket | 79 Paket | 70 Paket | 89% | 79 Paket | 224 Paket | 283,54% |
| 5.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 24 Paket | 24 Paket | 24 Paket | 24 Paket | 100% | 24 Paket | 72 Paket | 300% |
| 5.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12870 Paket | 11000 Paket | 12870 Paket | 3500 Paket | 27% | 12870 Paket | 27370 Paket | 212,67% |
| 5.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | 8 Paket | 5 Paket | 5 Paket | 100% | 8 Paket | 21 Paket | 420% |
| 5.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | 100% | 2 Laporan | 6 Laporan | 300% |
| 5.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase sarana dan prasarana yang terpenuhi | 95% | 80% | 95% | 91% | 96% | 95% | 88,67% | 93,33% |
| 5.01.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 4 Unit | 4 Unit | 4 Unit | 4 Unit | 100% | 4 Unit | 12 Unit | 300% |

Tabel 2. 1 Format A
Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Ponorogo

Nama Perangkat Daerah: Bapperida Kabupaten Ponorogo

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---------------------|--|--|--|--|---|---|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 5.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase administrasi perkantoran sesuai SOP | 95% | 97% | 95% | 97% | 102% | 95% | 96,33% | 101,40% |
| 5.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1200 Laporan | 1200 Laporan | 1200 Laporan | 800 Laporan | 67% | 1500 Laporan | 3500 Laporan | 291,67% |
| 5.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 3 Laporan | 300% |
| 5.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | - | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 2 Laporan | 200% |
| 5.01.01.2.09 | Pemeliharaan Baarng Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase sarana dan prasarana yang terpenuhi | 95% | 99% | 95% | 100% | 105% | 99% | 99,33% | 104,56% |
| 5.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit | 28 Unit | 6 Unit | 6 Unit | 100% | 28 Unit | 62 Unit | 1033,33% |
| 5.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 7 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 7 Unit | 350% | 2 Unit | 11 Unit | 157,14% |
| 5.01.01.2.09.11 | Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 7 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 100% | 7 Unit | 16 Unit | 800% |
| 5.01.02 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Prosentase usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan | 92% | 11% | 92% | 98% | 107% | 92% | 67% | 72,83% |

Tabel 2. 1 Format A
Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Ponorogo

Nama Perangkat Daerah: Bapperida Kabupaten Ponorogo

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---------------------|---|---|--|--|---|---|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | | Prosentase Efektifitas Capaian Sasaran Pembangunan | 90% | 90% | 90% | - | - | 90% | 60% | 66,67% |
| 5.01.02.2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Prosentase Usulan Yang Diakomodir Didokumen Perencanaan | 80% | 100% | 80% | 98% | 123% | 92% | 96,67% | 120,83% |
| 5.01.02.2.01.03 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | 2 Berita Acara | 1 Berita Acara | 2 Berita Acara | 2 Berita Acara | 100% | 2 Berita Acara | 5 Berita Acara | 250% |
| 5.01.02.2.01.04 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 3 Berita Acara | 26 Berita Acara | 4 Berita Acara | 3 Berita Acara | 75 % | 6 Berita Acara | 35 Berita Acara | 1166,67% |
| 5.01.02.2.01.05 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | 2 Berita Acara | 4 Berita Acara | 2 Berita Acara | 2 Berita Acara | 100% | 2 Berita Acara | 8 Berita Acara | 400% |
| 5.01.02.2.01.07 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | 4 Dokumen | 3 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% | 3 Dokumen | 10 Dokumen | 250% |
| 5.01.02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Prosentase dokumen perencanaan SKPD yang selaras | 84% | 84% | 84% | 98% | 117% | 84% | 88,67% | 105,56% |
| 5.01.02.2.03.01 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | 1 Laporan | 47 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 49 Laporan | 4900% |
| 5.01.02.2.03.03 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 3 Laporan | 47 Laporan | 3 Laporan | 3 Laporan | 100% | 2 Laporan | 52 Laporan | 1733,33% |
| 5.01.02.2.04 | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | | - | - | - | - | - | 92% | 92% | 92% |

Tabel 2. 1 Format A

Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Bapperida Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---------------------|--|---|--|--|---|---|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 5.01.02.2.04.01 | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola | 1 Dokumen | - | -- | - | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 5.01.02.2.04.02 | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | 4 Dokumen | - | - | - | - | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 50% |
| 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan | 92% | 94% | 92% | 92% | 100% | 92% | 92,67% | 100,72% |
| 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Prosentase usulan bidang sosial budaya yang diakomodir di dokumen perencanaan | 92% | 87% | 92% | 87% | 95% | 92% | 88,67% | 96,38% |
| 5.01.03.2.01.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | 29 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 31 Dokumen | 3100% |
| 5.01.03.2.01.03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 3 Laporan | 300% |
| 5.01.03.2.01.05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | 7 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 9 Dokumen | 900% |
| 5.01.03.2.01.07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 1 Laporan | 24 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 26 Laporan | 2600% |
| 5.01.03.2.01.08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | 1 Laporan | 7 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 9 Laporan | 900% |
| 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Prosentase usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup perekonomian dan SDA | 82% | 100% | 82% | 99% | 121% | 82% | 93,67% | 114,23% |

Tabel 2. 1 Format A
Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Ponorogo

Nama Perangkat Daerah: Bapperida Kabupaten Ponorogo

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---------------------|--|---|--|--|---|---|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 5.01.03.2.02.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 2 Dokumen | 5 Dokumen | 500% |
| 5.01.03.2.02.02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 3 Laporan | 300% |
| 5.01.03.2.02.03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 3 Laporan | 300% |
| 5.01.03.2.02.05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | 6 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 8 Dokumen | 800% |
| 5.01.03.2.02.06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 3 Laporan | 800% |
| 5.01.03.2.02.07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 3 Laporan | 300% |
| 5.01.03.2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Prosentase usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup prasarana | 74% | 93% | 74% | 99% | 134% | 74% | 88,67% | 119,82% |
| 5.01.03.2.03.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 3 Dokumen | 300% |
| 5.01.03.2.03.03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 3 Laporan | 300% |
| 5.01.03.2.03.05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 200 Dokumen | 3 Dokumen | 200 Dokumen | 200 Dokumen | 100% | 2 Dokumen | 205 Dokumen | 102,50% |

Tabel 2. 1 Format A

**Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Ponorogo**

Nama Perangkat Daerah: Bapperida Kabupaten Ponorogo

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---------------------|--|---|--|--|---|---|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 5.01.03.2.03.07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 3 Laporan | 300% |
| 5.05.02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan daerah yang dimanfaatkan / ditindaklanjuti | 90% | 71% | 90% | 96% | 107% | 90% | 85,67% | 95,19% |
| 5.05.02.2.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Prosentase hasil penelitian yang dilaksanakan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan | 90% | 90% | 90% | 96% | 107% | 90% | 92% | 102,22% |
| 5.05.02.2.01.12 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang terkelola dengan baik | 1 Laporan | 2 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 3 Laporan | 6 Laporan | 600% |
| 5.05.02.2.02 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Prosentase hasil penelitian yang dilaksanakan bidang sosial dan kependudukan | 90% | 99% | 90% | 96% | 107% | 90% | 95% | 105,56% |
| 5.05.02.2.02.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial | 1 Dokumen | 4 Dokumen | 1 Dokumen | - | - | 4 Dokumen | 8 Dokumen | 800% |
| 5.05.02.2.03 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Prosentase hasil penelitian yang dilaksanakan bidang ekonomi dan pembangunan | 90% | 94% | 90% | 99% | 110% | 90% | 94,33% | 104,81% |
| 5.05.02.2.03.04 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 4 Dokumen | 400% |
| 5.05.02.2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Indeks inovasi daerah | 90% | 91% | 90% | 96% | 107% | 90% | 92,33% | 102,59% |
| 5.05.02.2.04.01 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 1 Dokumen | 50 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 52 Dokumen | 5200% |
| 5.05.03 | PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH | Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan | 90% | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.05.03.2.02 | Invensi dan Inovasi | Persentase pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan inovasi daerah sesuai rencana | 90% | - | - | - | - | - | - | - |

Tabel 2. 1 Format A

Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Bapperida Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|-------------------|--|---|--|--|---|---|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 5.05.03.2.02.0001 | Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah | 1 Laporan | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.05.03.2.02.0002 | Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi | 1 Laporan | - | - | - | - | - | - | - |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menilai tingkat keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugas Bapperida dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan pengukuran kinerja berdasarkan sasaran strategis serta indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Bapperida. Hasil dari pengukuran ini kemudian disajikan dalam tabel sebagai bagian dari dokumentasi serta bahan evaluasi untuk menilai pencapaian yang telah dilakukan.

Tabel 2. 2 Format B

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bapperida Kabupaten Ponorogo

| NO | Indikator | SPM / Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Capaian Analisis |
|-------------|---|------------------------|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|-------------------|--------|----------|--------|------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Perencanaan | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kualitas Perencanaan | | | 80,85% | 80,90% | 80,95% | 81,00% | 81,00% | 78,00% | 78,05% | 81,00% | Tercapai |
| 1 | Persentase hasil penelitian yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan | | | 90% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Tercapai |
| 2 | Persentase kebijakan inovasi daerah yang diterapkan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah | | | 55% | 60% | 65% | 70% | 100% | 100% | 65% | 70% | Tercapai |
| 3 | Persentase implementasi rencana kelitbangan | | | 90% | 95% | 95% | 100% | 64% | 100% | 95% | 100% | Tercapai |

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.2, tingkat kinerja pelayanan Bapperida Kabupaten Ponorogo berada dalam kategori “Tercapai” dan menunjukkan tren yang positif secara umum. Capaian ini mencerminkan kinerja yang relatif stabil dan responsif terhadap

target yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra), khususnya dalam bidang perencanaan dan kelitbang.

b. Permasalahan dan Hambatan dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Ponorogo masih menghadapi berbagai permasalahan dan hambatan yang berdampak terhadap efektivitas pencapaian kinerja organisasi. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

1. Kualitas dan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan yang belum optimal.
2. Belum optimalnya penerapan pendekatan perencanaan yang partisipatif, inovatif, dan kreatif.
3. Kapasitas sumber daya manusia perencana yang masih perlu ditingkatkan.
4. Koordinasi antar pelaku pembangunan belum berjalan secara optimal.
5. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan belum sepenuhnya efektif.
6. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas.

c. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah (NSPK, SPM, SDGs)

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Ponorogo memberikan dampak langsung terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah. Keterlambatan serta rendahnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan menyebabkan arah kebijakan dan program pembangunan menjadi kurang terstruktur, tidak tepat sasaran, dan belum sepenuhnya mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sektor-sektor prioritas.

Belum optimalnya penerapan pendekatan perencanaan yang partisipatif, inovatif, dan kreatif turut berdampak pada rendahnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan. Hal ini menghambat terwujudnya prinsip inklusivitas sebagaimana diamanatkan dalam Norma, Standar, Prosedur,

dan Kriteria (NSPK) perencanaan pembangunan daerah, serta berdampak terhadap kontribusi daerah dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Kapasitas sumber daya manusia perencana yang masih perlu ditingkatkan berpengaruh pada rendahnya kualitas perencanaan berbasis data dan kurang optimalnya integrasi lintas sektor dan wilayah. Di sisi lain, lemahnya koordinasi antar pelaku pembangunan serta belum efektifnya fungsi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan berdampak pada ketidaksinkronan dokumen perencanaan dan pelaksanaan, serta menurunnya efektivitas capaian program dan kegiatan pembangunan daerah.

Selain itu, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung juga menjadi kendala dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kelembagaan, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi, penyediaan data perencanaan yang akurat, dan percepatan pelayanan perencanaan pembangunan.

d. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah, Bapperida Kabupaten Ponorogo menghadapi sejumlah tantangan dan peluang yang perlu dikelola secara strategis untuk mendukung pencapaian target kinerja SKPD.

Tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia perencana, baik dari segi jumlah maupun kompetensi teknis, yang berdampak pada belum optimalnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan yang berbasis data dan evidence-based.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, termasuk sistem informasi perencanaan, perangkat digital, dan akses data yang valid, sehingga menghambat efisiensi pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan.
3. Belum optimalnya koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya, yang menyebabkan rendahnya sinergi

program/kegiatan serta tumpang tindih dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

4. Perubahan regulasi nasional yang dinamis, terutama dalam kebijakan perencanaan berbasis elektronik dan integrasi dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah, menuntut percepatan adaptasi dari sisi kelembagaan.

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain:

1. Dukungan kebijakan nasional terhadap transformasi digital perencanaan pembangunan, seperti pengembangan sistem e-planning dan pemanfaatan aplikasi SIPD, membuka peluang perbaikan kualitas dan ketepatan perencanaan.
 2. Tersedianya program peningkatan kapasitas ASN bidang perencanaan, baik melalui pelatihan, pendampingan teknis, maupun kolaborasi dengan lembaga pelatihan pemerintah dan non-pemerintah.
 3. Meningkatnya partisipasi publik dalam proses perencanaan, memberikan ruang bagi penguatan pendekatan partisipatif dan transparan sesuai prinsip good governance dan amanat peraturan perundang-undangan.
 4. Peluang kolaborasi multipihak, termasuk dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta, dalam mendukung pelaksanaan riset, inovasi daerah, serta perumusan kebijakan berbasis data.
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Dalam rangka mendukung perumusan program dan kegiatan prioritas tahun perencanaan serta memperkuat pencapaian tujuan strategis daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025–2029, maka dirumuskan rekomendasi dan catatan strategis sebagai berikut:

1. Perlunya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas dan tepat waktu serta kajian sebagai bahan penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

2. Membangun Perencanaan Daerah yang Kreatif, inovatif dan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
3. Perlunya peningkatan SDM perencana.
4. Koordinasi antar pelaku pembangunan perlu ditingkatkan.
5. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pembangunan melalui monitoring dan evaluasi.
6. Peningkatan sarana prasarana kantor dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Seluruh rekomendasi dan catatan strategis tersebut menjadi acuan dalam merancang program dan kegiatan Bapperida tahun perencanaan, guna menjawab tantangan yang ada serta memanfaatkan peluang secara optimal.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Terdapat beberapa perubahan terhadap Program/Kegiatan SKPD yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan perlunya merubah beberapa nomenklatur program dan kegiatan. Perubahan tersebut didasari oleh diterbitkannya Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 40 Tahun 2025 tanggal 30 April 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026, secara umum program, kegiatan, dan sub kegiatan Bapperida Kabupaten Ponorogo masih tetap relevan dan konsisten. Tidak terdapat perbedaan signifikan dalam struktur program dan kegiatan antara dokumen Rancangan Awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan. Seluruh kodefikasi kegiatan, indikator kinerja, target, lokasi pelaksanaan, serta pagu indikatif tercatat tetap atau identik pada kedua dokumen. Namun, terdapat sedikit perbedaan dalam penyebutan atau format

penyajian pada beberapa sub kegiatan, seperti pada penyebutan satuan target output maupun penyisipan keterangan tambahan teknis pada indikator.

Dengan demikian, tidak terdapat perubahan substansial antara rancangan awal dan hasil analisis kebutuhan, namun sangat penting untuk memastikan validitas, legalitas, dan keselarasan dengan regulasi SOTK terbaru serta untuk memperkuat akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah.

Perbandingan Program/Kegiatan SKPD yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPd dan Hasil analisa kebutuhan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Format C

Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Bapperida Kabupaten Ponorogo

| Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan (Renja SKPD) | | | | |
|-------------------|--|--------------------|--|-----------|----------------------|--|--------------------|--|-----------|----------------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | | | | |
| 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | |
| 5.01 | PERENCANAAN | | | | 11.150.341.050,00 | PERENCANAAN | | | | 11.150.341.050,00 |
| 5.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kabupaten Ponorogo | Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana dan prasarana perangkat daerah yang memadai | 90% | 7.750.774.870,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kabupaten Ponorogo | Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana dan prasarana perangkat daerah yang memadai | 90% | 7.750.774.870,00 |
| 5.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kabupaten Ponorogo | Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu | 90% | 15.000.000,00 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kabupaten Ponorogo | Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu | 90% | 15.000.000,00 |
| 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 dokumen | 10.000.000,00 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 dokumen | 10.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|--|--------------------|------------------|---|--------------------|--|--------------------|------------------|
| 5.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 laporan | 5.000.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 laporan | 5.000.000,00 |
| 5.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kabupaten Ponorogo | Prosentase dokumen pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu | 90% | 6.023.694.700,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kabupaten Ponorogo | Prosentase dokumen pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu | 90% | 6.023.694.700,00 |
| 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 37 Orang/ Bulan | 5.704.632.100,00 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 37 Orang/ Bulan | 5.704.632.100,00 |
| 5.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 3 Dokumen | 319.062.600,00 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 3 Dokumen | 319.062.600,00 |
| 5.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kabupaten Ponorogo | Prosentase disiplin dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur yang terpenuhi | 90% | 171.480.000,00 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kabupaten Ponorogo | Prosentase disiplin dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur yang terpenuhi | 90% | 171.480.000,00 |
| 5.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 65 Paket | - | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 65 Paket | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------------------------|---|-------------|-----------------------|---|---------------------------|---|-------------------|-----------------------|
| 5.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 25 Orang | 171.480.000,00 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 25 Orang | 171.480.000,00 |
| 5.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kabupaten Ponorogo | Prosentase administrasi perkantoran sesuai SOP | 95% | 588.468.000,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kabupaten Ponorogo | Prosentase administrasi perkantoran sesuai SOP | 95% | 588.468.000,00 |
| 5.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 79 Paket | 150.000.000,00 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 79 Paket | 150.000.000,00 |
| 5.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 24 Paket | 100.000.000,00 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 24 Penerima Paket | 100.000.000,00 |
| 5.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12870 Paket | 148.468.000,00 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12870 Paket | 148.468.000,00 |
| 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 8 Paket | 25.000.000,00 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 8 Paket | 25.000.000,00 |
| 5.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 5 Dokumen | - | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 5 Dokumen | - |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|--|----------------|----------------|--|--------------------|--|----------------|----------------|
| 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 kali Laporan | 165.000.000,00 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 kali Laporan | 165.000.000,00 |
| 5.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kabupaten Ponorogo | Presentase Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi | 95% | 190.000.000,00 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kabupaten Ponorogo | Presentase Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi | 95% | 190.000.000,00 |
| 5.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 4 Unit | 190.000.000,00 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 4 Unit | 190.000.000,00 |
| 5.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kabupaten Ponorogo | Presentase Jasa Penunjang yang Tersedia Sesuai | 95% | 260.092.170,00 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kabupaten Ponorogo | Presentase Jasa Penunjang yang Tersedia Sesuai | 95% | 260.092.170,00 |
| 5.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1500 Laporan | - | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1500 Laporan | 15.000.000,00 |
| 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 194.092.170,00 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 194.092.170,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------------------------|---|------------|-----------------------|---|---------------------------|---|------------|-----------------------|
| 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 66.000.000,00 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 66.000.000,00 |
| 5.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kabupaten Ponorogo | Presentase barang milik daerah yang dipelihara sesuai | 95% | 502.040.000,00 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kabupaten Ponorogo | Presentase barang milik daerah yang dipelihara sesuai | 95% | 502.040.000,00 |
| 5.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 28 Unit | 240.000.000,00 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 28 Unit | 240.000.000,00 |
| 5.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 2 Unit | 160.000.000,00 | Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 2 Unit | 160.000.000,00 |
| 5.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 7 Unit | 102.040.000,00 | Pemeliharaan/Rehabilitasi i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 7 Unit | 102.040.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------------------------|---|------------------|-------------------------|---|---------------------------|--|------------------|-------------------------|
| 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Kabupaten Ponorogo | Persentase efektifitas capaian sasaran pembangunan | 90% | 1.917.980.000,00 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Kabupaten Ponorogo | Persentase efektifitas capaian sasaran pembangunan | 90% | 1.917.980.000,00 |
| | | Kabupaten Ponorogo | Persentase usulan yang diakomodir didokumen perencanaan | 92% | | | Kabupaten Ponorogo | Persentase usulan yang diakomodir didokumen perencanaan | 92% | |
| 5.01.02.2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang disusun tepat waktu | 2 Dokumen | 1.670.480.000,00 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang disusun tepat waktu | 2 Dokumen | 1.670.480.000,00 |
| 5.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | 1 Berita Acara | 150.000.000,00 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | 1 Berita Acara | 150.000.000,00 |
| 5.01.02.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 3 Berita Acara | 60.000.000,00 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 3 Berita Acara | 60.000.000,00 |
| 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | 1 Berita Acara | 380.000.000,00 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | 1 Berita Acara | 380.000.000,00 |
| 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | 2 Dokumen | 1.080.480.000,00 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | 2 Dokumen | 1.080.480.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | (RPJPD/RPJMD/ RKPD) | | |
| 5.01.02.2. 02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Kabupaten Ponorogo | Prosentase Anlisis data dan Informasi Pemerintahan Untuk Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah | 95% | 0,00 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Kabupaten Ponorogo | Prosentase Anlisis data dan Informasi Pemerintahan Untuk Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah | 95% | 0,00 |
| 5.01.02.2. 02.0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi | 48 Orang | 0,00 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi | 48 Orang | 0,00 |
| 5.01.02.2. 03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Indikator Kinerja Daerah yang Tercapai | 135 Indikator | 197.500.000,00 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Indikator Kinerja Daerah yang Tercapai | 135 Indikator | 197.500.000,00 |
| 5.01.02.2. 03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | 1 Laporan | 53.907.600,00 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | 1 Laporan | 53.907.600,00 |
| 5.01.02.2. 03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 2 Laporan | 143.592.400,00 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 2 Laporan | 143.592.400,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|---|-----------|------------------|--|--------------------|---|-----------|------------------|
| 5.01.02.2.04 | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Data Dalam Sistem Informasi Pemerintahan di Daerah Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola | 1676 Data | 50.000.000,00 | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Data Dalam Sistem Informasi Pemerintahan di Daerah Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola | 92% | 50.000.000,00 |
| 5.01.02.2.04.0001 | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola | 1 Dokumen | 50.000.000,00 |
| 5.01.02.2.04.0002 | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | 1 Dokumen | - | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | 1 Dokumen | - |
| 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Kabupaten Ponorogo | Persentase keselarasan dokumen perencanaan | 92% | 1.481.586.180,00 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Kabupaten Ponorogo | Persentase keselarasan dokumen perencanaan | 92% | 1.481.586.180,00 |
| 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Kabupaten Ponorogo | Prosentase usulan bidang sosial budaya yang diakomodir di dokumen perencanaan | 92% | 631.586.180,00 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Kabupaten Ponorogo | Prosentase usulan bidang sosial budaya yang diakomodir di | 92% | 631.586.180,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|---|-----------|----------------|---|--------------------|---|-----------|----------------|
| | | | | | | | | dokumen perencanaan | | |
| 5.01.03.2.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | 83.768.180.00 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | 83.768.180.00 |
| 5.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 1 Laporan | 26.650.000,00 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 1 Laporan | 26.650.000,00 |
| 5.01.03.2.01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | 250.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------------------|---|------------|-----------------------|--|---------------------------|---|------------|-----------------------|
| 5.01.03.2.01.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 1 Laporan | 21.150.000,00 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 1 Laporan | 21.150.000,00 |
| 5.01.03.2.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | 1 Laporan | 250.000.000,00 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | 1 Laporan | 250.000.000,00 |
| 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Kabupaten Ponorogo | Prosentase usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup perekonomian dan SDA | 82% | 400.000.000,00 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Kabupaten Ponorogo | Prosentase usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup perekonomian dan SDA | 82% | 400.000.000,00 |
| 5.01.03.2.02.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 2 Dokumen | 90.000.000,00 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya | 2 Dokumen | 90.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|--|-----------|----------------|---|--------------------|--|-----------|----------------|
| | | | | | | | | (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | |
| 5.01.03.2.02.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 1 Laporan | 50.000.000,00 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 1 Laporan | 50.000.000,00 |
| 5.01.03.2.02.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 1 Laporan | 100.000.000,00 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 1 Laporan | 100.000.000,00 |
| 5.01.03.2.02.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya | 1 Dokumen | 50.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|---|-----------|----------------|--|--------------------|---|-----------|----------------|
| | | | | | | | | (RPJPD, RPJMD dan RKP) | | |
| 5.01.03.2.02.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 1 Laporan | 50.000.000,00 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 1 Laporan | 50.000.000,00 |
| 5.01.03.2.02.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 1 Laporan | 60.000.000,00 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 1 Laporan | 60.000.000,00 |
| 5.01.03.2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Kabupaten Ponorogo | Prosentase usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup prasarana | 74% | 450.000.000,00 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Kabupaten Ponorogo | Prosentase usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup prasarana | 74% | 450.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|---|-------------|----------------|--|--------------------|---|-------------|----------------|
| 5.01.03.2.03.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | 180.000.000,00 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | 180.000.000,00 |
| 5.01.03.2.03.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | 36.000.000,00 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | 36.000.000,00 |
| 5.01.03.2.03.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 200 Dokumen | 200.000.000,00 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 200 Dokumen | 200.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------------------|---|------------|-------------------------|---|---------------------------|---|------------|-------------------------|
| 5.01.03.2.03.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang \Kewilayahan | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 1 Laporan | 34.000.000,00 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang \Kewilayahan | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 1 Laporan | 34.000.000,00 |
| 5.05 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 1.382.500,00 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 1.382.500,00 |
| 5.05.02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Kabupaten Ponorogo | Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan daerah yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti | 90% | 1.382.500.000,00 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Kabupaten Ponorogo | Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan daerah yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti | 90% | 1.382.500.000,00 |
| 5.05.02.2.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Perencanaan Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah | 3 Kajian | 150.000.000,00 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Perencanaan Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah | 3 Kajian | 150.000.000,00 |
| | | Kabupaten Ponorogo | Prosentase hasil penelitian yang dilaksanakan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan | 90% | | | Kabupaten Ponorogo | Prosentase hasil penelitian yang dilaksanakan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan | 90% | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|
| 5.05.02.2.01.0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik | 3 Laporan | 150.000.000,00 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik | 3 Laporan | 150.000.000,00 |
| 5.05.02.2.02 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Perencanaan Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Sosial dan Kependudukan | 3 Kajian | 407.500.000,00 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Perencanaan Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Sosial dan Kependudukan | 3 Kajian | 407.500.000,00 |
| 5.05.02.2.02.0001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | 4 Dokumen | 407.500.000,00 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | 4 Dokumen | 407.500.000,00 |
| 5.05.02.2.03 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Perencanaan Kajian Penelitian dan Pengembangan daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 3 Kajian | 175.000.000,00 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Perencanaan Kajian Penelitian dan Pengembangan daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 3 Kajian | 175.000.000,00 |
| 5.05.02.2.03.0004 | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | 1 Dokumen | 175.000.000,00 | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | 1 Dokumen | 175.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|---|-------------|----------------|--|--------------------|---|-------------|----------------|
| 5.05.02.2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Inovasi Daerah | 120 Inovasi | 650.000.000,00 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Inovasi Daerah | 120 Inovasi | 650.000.000,00 |
| 5.05.02.2.04.0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 1 Dokumen | 650.000.000,00 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 1 Dokumen | 650.000.000,00 |
| 5.05.03 | PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH | Kabupaten Ponorogo | Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan | 90% | - | PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH | Kabupaten Ponorogo | Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan | 90% | - |
| 5.05.03.2.02 | Invensi dan Inovasi | Kabupaten Ponorogo | Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Pembinaan Inovasi Daerah Sesuai Rencana | 90% | - | Invensi dan Inovasi | Kabupaten Ponorogo | Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Pembinaan Inovasi Daerah Sesuai Rencana | 90% | - |
| 5.05.03.2.02.0001 | Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah | 1 Laporan | - | Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah | 1 Laporan | - |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------|--|-----------|---|---|--------------------|--|-----------|---|
| 5.05.03.2. 02.0002 | Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Promosi dan Kampanye Inovasi | 1 Laporan | - | Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi | Kabupaten Ponorogo | Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Promosi dan Kampanye Inovasi | 1 Laporan | - |
|-----------------------|---|--------------------|--|-----------|---|---|--------------------|--|-----------|---|

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Bapperida Kabupaten Ponorogo melakukan proses perencanaan program dan kegiatan dengan sistem partisipatif, selaras, dan efektif yang didukung oleh hasil-hasil penelitian dan pengembangan. Sehingga pelaksanaan program dan kegiatan berbasis pada kepentingan masyarakat, didukung dengan ketepatan waktu dan keselarasan dengan dokumen perencanaan.

Tabel 2. 5 Format D

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Ponorogo

| No | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|----|-----------------------------------|--------|-------------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | NIHIL | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

BAB III

TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Ponorogo yang berkualitas, perlu dilakukan penyesuaian dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Salah satu acuan penting dalam penyesuaian tersebut adalah dokumen Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Tahun 2025–2029 yang memuat visi dan misi pembangunan nasional sebagai dasar perencanaan pembangunan jangka menengah.

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 adalah

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, yang diwujudkan melalui delapan misi yang disebut "Asta Cita".

Misi :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas memerlukan dukungan data dan informasi yang bersumber dari hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan sebelumnya, serta dari hasil kajian kebijakan yang relevan. Pemanfaatan hasil-hasil tersebut tidak hanya penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi landasan dalam perumusan arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika nasional.

Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi proses perencanaan, diperlukan penguatan peran koordinasi dengan para pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah pusat dan daerah, maupun dari lembaga non-pemerintah dan masyarakat. Sinergi dan kolaborasi yang baik akan mendorong keselarasan pembangunan antara pusat dan daerah secara berkelanjutan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan SKPD merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi Misi Kepala Daerah yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD. Tujuan SKPD akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi.

Dalam RPJMD Kabupaten Ponorogo 2025-2029, Bapperida Kabupaten Ponorogo sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan turut bertanggungjawab atas pencapaian misi ke 4 Bupati terpilih yaitu "Transformasi Tata Kelola Untuk Mewujudkan Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, Inklusif, Bermanfaat, serta Berdampak Secara Sosial dan Ekonomi Berbasis Revolusi Teknologi Informasi". Adapun sasaran misi ke 4 yang turut menjadi tanggungjawab Bappeda Litbang adalah "Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan transparan, serta Pelayanan Publik yang Unggul Berbasis Elektronik".

Seiring dengan rumusan sasaran RPJMD Kabupaten Ponorogo serta untuk mendukung pencapaian misi Bupati dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

bersih, transparan, dan pelayanan publik berbasis elektronik, maka Bapperida Kabupaten Ponorogo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya merumuskan tujuan sebagai berikut: “Mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, selaras, dan efektif yang didukung oleh hasil-hasil penelitian dan inovasi daerah.”

Sasaran SKPD merupakan penjabaran dari tujuan SKPD yang disusun secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu, serta berkesinambungan dan sejalan dengan arah kebijakan nasional, provinsi, dan daerah. Sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD Tahun 2025–2029, maka Sasaran Renja SKPD Tahun 2026 adalah:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan arah kebijakan nasional, provinsi, dan daerah.
2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
4. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
5. Meningkatnya kajian strategis yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.
6. Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam dokumen perencanaan pembangunan.
7. Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terhadap pelaksanaan riset dan inovasi daerah.
8. Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam proses perencanaan dan pembangunan.

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang daerah dibidang Perencanaan dan fungsi penunjang daerah dibidang Penelitian dan Pengembangan, Bapperida Kabupaten Ponorogo mengampu dua urusan pemerintahan daerah yaitu Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan dan Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan.

Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Bapperida Kabupaten Ponorogo pada tahun 2026 yang seluruhnya bersumber dari dana APBD II, adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- a. Penyusunan Perencanaan Pendanaan
 1. Pelaksanaan Konsultasi Publik
 2. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
 3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 4. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- c. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
 1. Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
 2. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
 2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 5. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

- b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - 1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - 4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 - 6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
- c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - 1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - 4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
 - 5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayaha
 - 7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

- a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

1. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
- b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
 2. Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
- c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 1. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
 2. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
- d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Informasi

5. Program Riset dan Inovasi Daerah

- a. Inovasi dan Inovasi
 1. Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah
 2. Fasilitasi dan Pembinaan untuk Promosi dan Kampanye Inovasi

Rincian Program dan Kegiatan kegiatan dimaksud disajikan sebagaimana dalam tabel Format E berikut:

Tabel 3. 3 Format E
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Ponorogo

Nama Perangkat Daerah: Bapperida Kabupaten Ponorogo

| Kode | Urusan / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|--------------------------|---|--|---------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | | | | 12.532.841.050,00 | | | | 12.532.841.050,00 |
| 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | |
| 5.01 | PERENCANAAN | | | | 11.150.341.050,00 | | | | 11.150.341.050,00 |
| 5.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | <i>Prosentase Pelayanan Administrasi umum kepegawaian serta penyediaan sarana dan prasarana perankat daerah yang memadai</i> | <i>Kabupaten Ponorogo</i> | 90 % | 7.750.774.870,00 | DAU | | 90% | 14.490.804.738,83 |
| 5.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu | Kabupaten Ponorogo | 90% | 15.000.000,00 | | | 90% | 44.289.025,00 |
| 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kabupaten Ponorogo | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | DAU | | 1 Dokumen | 17.715.610,00. |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--------------------|-----------|------------------|-----|--|-----------|----------------|
| 5.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen (Renstra, Renja, RKA) | Kabupaten Ponorogo | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | DAU | | 1 Dokumen | 26.573.415,00 |
| 5.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Prosentase dokumen pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu | Kabupaten Ponorogo | 90% | 6.023.694.700,00 | DAU | | 90% | 11.923.694,32 |
| 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | Kabupaten Ponorogo | 5 Dokumen | 5.704.623.100,00 | DAU | | 5 Dokumen | 11.126.208.423 |
| 5.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kabupaten Ponorogo | 3 Dokumen | 319.062.600,00 | DAU | | 3 Dokumen | 797.485.899,76 |
| 5.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Prosentase disiplin dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur yang terpenuhi | Kabupaten Ponorogo | 90% | 171.480.000,00 | DAU | | 90% | 239.160.735 |
| 5.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Penerima Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu/ Pakaian Tradisional | Kabupaten Ponorogo | 65 Orang | | DAU | | 65 Orang | Rp 60.911.050 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|---------------------------|-------------------|-----------------------|------------|--|-------------------|--------------------|
| 5.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Kabupaten Ponorogo | 25 Orang | 171.480.000,00 | DAU | | 12 Orang | 177.156.100 |
| 5.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase administrasi perkantoran sesuai SOP | Kabupaten Ponorogo | 95% | 588.468.000,00 | DAU | | 95% | 109.984.385 |
| 5.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Penyediaan dan Perlengkapan Kantor | Kabupaten Ponorogo | 79 Item | 150.000.000,00 | DAU | | 79 Item | 168.298.295 |
| 5.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Kabupaten Ponorogo | 24 Penerima Paket | 100.000.000,00 | DAU | | 24 Penerima Paket | 157.936.762 |
| 5.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kabupaten Ponorogo | 12870 Paket | 148.468.000,00 | DAU | | 12870 Paket | 372.027.810 |
| 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia | Kabupaten Ponorogo | 8 Item | 25.000.000,00 | DAU | | 8 Item | 35.431.220 |
| 5.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Tersedia | Kabupaten Ponorogo | 5 Buah/ Bulan | | DAU | | 5 Buah/ bulan | 30.116.537 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|---------------------------|----------------|-----------------------|------------|--|------------------------------------|-----------------------|
| 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kabupaten Ponorogo | 2 kali Laporan | 165.000.000,00 | DAU | | 2 kali Laporan | 322.707.500 |
| 5.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase Sarana dan Prasarana yang terpenuhi | Kabupaten Ponorogo | 95% | 190.000.000,00 | DAU | | 95% | 354.292.004 |
| 5.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah PLaporan pengadaan peralatan,perlengkapan Gedung kantor dan rumah jabatan/ rumah dinas | Kabupaten Ponorogo | 4 Laporan | 190.000.000,00 | DAU | | 4 Laporan | 352.669.800,48 |
| 5.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Jasa Penunjang yang tersedia sesuai kebutuhan | Kabupaten Ponorogo | 95% | 260.092.170,00 | DAU | | 95% | 335.361.234,08 |
| 5.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kabupaten Ponorogo | 1500 Laporan | | DAU | | 1500 Surat Masuk 1200 surat Keluar | 8.777.280,50 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------|--|------------|-----------------------|
| 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kabupaten Ponorogo | 1 Tahun (Laporan) | 194.092.170,00 | DAU | | 1 Tahun | 326.515.797,40 |
| 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kabupaten Ponorogo | 1 Laporan | 66.000.000,00 | DAU | | 1 Laporan | 326.515.797,40 |
| 5.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase barang milik daerah yang dipelihara sesuai jadwal | Kabupaten Ponorogo | 95% | 502.040.000,00 | DAU | | 95% | 496.899.080,92 |
| 5.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Kabupaten Ponorogo | 28 Unit | 240.000.000,00 | DAU | | 28 Unit | 318.806.161,82 |
| 5.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Bangunan Gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kabupaten Ponorogo | 7 Jenis (2 Unit) | 160.000.000,00 | DAU | | 7 Jenis | 88.618.579,50 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|---------------------------|------------------------|-------------------------|------------|--|----------------|-------------------------|
| 5.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Laporan pemeliharaan rutin Berkala Gedung kantor, sarana prasarana penunjang Gedung kantor, rumah jabatan dan rumah dinas Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kabupaten Ponorogo | 2 Laporan (7 Unit) | 102.040. 000,00 | DAU | | 2 Laporan | 88.618.579,50 |
| 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase efektivitas capaian sasaran pembangunan | Kabupaten Ponorogo | 90% | 1.917.980.000,00 | DAU | | 90% | 3.549.267.500,32 |
| | | Persentase usulan yang diakomodir didokumen perencanaan | Kabupaten Ponorogo | 92% | | DAU | | 92% | |
| 5.01.02.2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Prosentase Usulan Yang Diakomodir Didokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang disusun tepat waktu | Kabupaten Ponorogo | 92% (2 Dokumen) | 1.670.480,000,00 | DAU | | 92% | 3.051.459.23 |
| 5.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | Kabupaten Ponorogo | 1 Berita Acara | 150.000.000,00 | DAU | | 1 Berita Acara | 204.526.717,45 |
| 5.01.02.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Kabupaten Ponorogo | 3 Berita Acara | 60.000.000,00 | DAU | | 3 Berita Acara | 177.156.650,00 |
| 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | Kabupaten Ponorogo | 1 Berita Acara | 380.000.000,00 | DAU | | 1 Berita Acara | 598.761.220,37 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-----|--|------------|-----------------------|
| 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | Kabupaten Ponorogo | 2 Dokumen | 1.080.480.000,00 | DAU | | 1 Dokumen | 2.070.133.867,64 |
| 5.01.02.2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Prosentase Analisis data informasi pemerintahan daerah yang disediakan tepat waktu | Kabupaten Ponorogo | 95% | 0,00 | DAU | | | |
| 5.01.02.2.02.0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi | Kabupaten Ponorogo | 48 Orang | 0,00 | DAU | | | |
| 5.01.02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Indikator Kinerja Daerah Yang Tercapai Prosentase dokumen perencanaan SKPD yang selaras | Kabupaten Ponorogo | 84% (135 Indikator) | 197.500.000,00 | DAU | | 84% | 498.928.090,10 |
| 5.01.02.2.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | Kabupaten Ponorogo | 94 DOK (1 Laporan) | 53.907.600,00 | DAU | | 94 DOK | 292.856.660,33 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|---------------------------|------------------|-------------------------|------------|--|------------|-------------------------|
| 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | Kabupaten Ponorogo | 2 Laporan | 143.592.400,00 | DAU | | 47 Laporan | 206.071.430,06. |
| 5.01.02.2.04 | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Jumlah Data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang di Kelola | Kabupaten Ponorogo | 1676 Data | 50.000.000,00 | DAU | | | |
| 5.01.02.2.04.0001 | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola | Kabupaten Ponorogo | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | DAU | | | |
| 5.01.02.2.04.0002 | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Kabupaten Ponorogo | 1 Dokumen | | DAU | | | |
| 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase keselarasan dokumen perencanaan | Kabupaten Ponorogo | 92% | 1.481.586.180,00 | DAU | | 92% | 2.505.554.507,83 |
| 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Prosentase usulan bidang sosial budaya yang diakomodir di dokumen perencanaan | Kabupaten Ponorogo | 92% | 631.586.180,00 | DAU | | 92% | 1.185.174.309,00. |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--------------------|---------------------|----------------|-------------|--|---------|--------------------|
| 5.01.03.2.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Kabupaten Ponorogo | 29 SKPD (1 Dokumen) | 83.786.180,00 | DAU | | 29 SKPD | 212.587.320 |
| 5.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Prosentase rekomendasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang ditindak lanjuti oleh SKPD dan Lembaga jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Kabupaten Ponorogo | 90% (1 Laporan) | 26.650.000,00 | DAU | | 90 % | 44.997.649 |
| 5.01.03.2.01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah SKPD yang dikoordinasikan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Kabupaten Ponorogo | 7 SKPD (1 Dokumen) | 250.000.000,00 | Pajak Rokok | | 7 SKPD | 477.612.846 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|--|-----------|-----------------------|
| 5.01.03.2.01.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah SKPD yang Dikoordinasikan lingkup Sosial budaya Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Kabupaten Ponorogo | 48 SKPD (1 Laporan) | 21.150.000,00 | DAU | | 48 SKPD | 74.405.562 |
| 5.01.03.2.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah tatanan Kabupaten sehat yang dibina Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | Kabupaten Ponorogo | 9 Tatanan (1 Laporan) | 250.000.000,00 | Pajak Rokok | | 9 Tatanan | 375.570.932 |
| 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Prosentase usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup perekonomian dan SDA | Kabupaten Ponorogo | 82% | 400.000.000,00 | DAU | | 82% | 682.547.022,08 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--------------------|--------------------------|----------------|-----|--|-----------|-----------------------|
| 5.01.03.2.02.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah SKPD yang Dikoordinasi kan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Kabupaten Ponorogo | 2 SKPD (2 Dokumen) | 90.000.000,00 | DAU | | 2 SKPD | 119.048.899,20 |
| 5.01.03.2.02.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Prosentase rekomendasi perencanaan industry, perdagangan dan koperasi yang ditindak lanjuti oleh SKPD Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Kabupaten Ponorogo | 80% (1 Laporan) | 50.000.000,00 | DAU | | 80% | 132.867.075,00 |
| 5.01.03.2.02.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | jumlah dokumen penguatan ekonomi kreatif, industry perdagangan dan koperasi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Kabupaten Ponorogo | 1 Dokumen (1 Laporan) | 100.000.000,00 | DAU | | 1 Dokumen | 96.550.074,50 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|--|------------|----------------------|
| 5.01.03.2.02.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Kabupaten Ponorogo | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | DAU | | 1 Dokumen | 119.048.899,20 |
| 5.01.03.2.02.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah dokumen SKPD yang diasistensi Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Kabupaten Ponorogo | 1 Dokumen (1 Laporan) | 50.000.000,00 | DAU | | 1 Dokumen | 88.578.050,00 |
| 5.01.03.2.02.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah SKPD yang di monev Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Kabupaten Ponorogo | 1 SKPD (1 Laporan) | 60.000.000,00 | DAU | | 1 SKPD | 96.550.074,50 |
| 5.01.03.2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Prosentase usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup prasarana | Kabupaten Ponorogo | 74% | 450.000.000,00 | DAU | | 74% | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--------------------|---------------------------|----------------|-----|--|--------|-----------------------|
| 5.01.03.2.03.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Kabupaten Ponorogo | 1 SKPD (1 Dokumen) | 180.000.000,00 | DAU | | 1 SKPD | 222.454.914,77 |
| 5.01.03.2.03.0003 | | Jumlah SKPD yang dikoordinasikan lingkup SDA dan LH Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Kabupaten Ponorogo | 1 SKPD (1 Laporan) | 36.000.000,00 | DAU | | 1 SKPD | 92.121.172,00 |
| 5.01.03.2.03.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah SKPD yang dikoordinasikan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Kabupaten Ponorogo | 3 SKPD (2 Dokumen) | 200.000.000,00 | DAU | | 3 SKPD | 231.123.162,74 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---------------------------|------------------------|-------------------------|------------|--|------------|-------------------------|
| 5.01.03.2.03.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang \Kewilayahan | Jumlah SKPD yang dikoordinasikan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Kabupaten Ponorogo | 90% (1 Laporan) | 34.000.000,00 | DAU | | 90% | 92.133.927,24 |
| 5.05 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 1.382.500.000,00 | | | | |
| 5.05.02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan daerah yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti | Kabupaten Ponorogo | 90% | 1.382.500.000,00 | DAU | | 90% | 1.001.569.726,96 |
| 5.05.02.2.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Prosentase Hasil penelitian yang dilaksanakan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan Jumlah Perencanaan Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah | Kabupaten Ponorogo | 90% (3 Kajian) | 150.000.000,00 | DAU | | 90% | 283.449.760,00 |
| 5.05.02.2.01.0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik | Kabupaten Ponorogo | 3 Laporan | 150.000.000,00 | DAU | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--------------------|-----------------|----------------|-----|--|-----|----------------|
| 5.05.02.2.02 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Prosentase Hasil penelitian yang dilaksanakan bidang sosial dan kependudukan Jumlah Perencanaan Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Sosial dan Kependudukan | Kabupaten Ponorogo | 90% (3 Kajian) | 407.500.000,00 | DAU | | 90% | 265.734.150,00 |
| 5.05.02.2.02.0001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | Kabupaten Ponorogo | 4 Dokumen | 407.500.000,00 | DAU | | | |
| 5.05.02.2.03 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Prosentase Hasil penelitian yang dilaksanakan bidang ekonomi dan pembangunan Jumlah Perencanaan Kajian Penelitian dan pengembangan Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Kabupaten Ponorogo | 90% (3 Kajian) | 175.000.000,00 | DAU | | 90% | 319.518.741,96 |
| 5.05.02.2.03.0004 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | Kabupaten Ponorogo | 1 Dokumen | 175.000.000,00 | DAU | | | |
| 5.05.02.2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Jumlah Inovasi Daerah | Kabupaten Ponorogo | 120 Inovasi | 650.000.000,00 | DAU | | | 132.867.075,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|--------------------|------------|----------------|-----|---|---|----------------|
| 5.05.02.2.04.0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Kabupaten Ponorogo | 1 Dokumen | 650.000.000,00 | DAU | | | 132.867.075,00 |
| 5.05.03 | PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH | Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan | | 90% | - | - | - | - | - |
| 5.05.03.2.02 | Invensi dan Inovasi | Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Pembinaan Inovasi Daerah Sesuai Rencana | | 90% | - | - | - | - | - |
| 5.05.03.2.02.0001 | Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah | Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah | | 1 Laporan | - | - | - | - | - |
| 5.05.03.2.02.0002 | Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi | Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Promosi dan Kampanye Inovasi | | 1 Laporan | - | - | - | - | - |

3.4 Penentuan Isu – isu Strategis

Isu strategis pembangunan Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Perlunya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas dan tepat waktu serta kajian sebagai bahan penyusunan kebijakan pembangunan daerah;
2. Membangun perencanaan daerah yang kreatif, innovative dan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan;
3. Perlunya peningkatan SDM perencana;
4. Koordinasi antar pelaku pembangunan perlu ditingkatkan;
5. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pembangunan melalui monitoring dan evaluasi;
6. Peningkatan sarana prasarana kantor dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026, maka diusulkan rencana kerja serta usulan pendanaan sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten Ponorogo
Usulan Program/Kegiatan Rencana Kerja
Per Organisasi Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2026

| No | Kode Rekening | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator | | | Volume | Perkiraan Biaya | | Sumber Dana |
|----|-------------------|---|---|--|--|-----------|------------------|------------------|-------------|
| | | | Capaian Program | Hasil | Keluaran | | APBD Kas | Total | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | | | | | | | |
| | 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | |
| | 5.01 | PERENCANAAN | | | | | | | |
| 1 | 5.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | <i>Prosentase sarana dan prasarana yang terpenuhi</i> | | | 95% | 7.293.180.770,00 | 7.293.180.770,00 | |
| | 5.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | |
| | 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 dokumen | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | DAU |
| | 5.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 laporan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | DAU |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|--|--|---|------------------|-------------------------|-------------------------|-----|
| | 5.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan | | 1 Dokumen | 6.023.649.700,00 | 6.023.649.700,00 | |
| | 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 37 Orang/bulan | 5.704.632.100,00 | 5.704.632.100,00 | DAU |
| | 5.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 3 Dokumen | 319.062.600,00 | 319.062.600,00 | DAU |
| | 5.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 1 Dokumen | 171.480.000,00 | 171.480.000,00 | |
| | 5.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 65 Paket | - | - | DAU |
| | 5.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 25 Orang | 171.480.000,00 | 171.480.000,00 | DAU |
| | 5.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Tersusunnya Dokumen Administrasi Perkantoran sesuai SOP | | 1 Dokumen | 588.468.000,00 | 588.468.000,00 | |
| | 5.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 79 Paket | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | DAU |
| | 5.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 24 Paket | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | DAU |
| | 5.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12870 Paket | 148.468.000,00 | 148.468.000,00 | DAU |
| | 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 8 Paket | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | DAU |
| | 5.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 5 Dokumen | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|--------------|----------------|----------------|-----|
| 5.01.01.2 .06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | 165.000.000,00 | 165.000.000,00 | DAU |
| 5.01.01.2 .07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Tersedianya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 1 Dokumen | 190.000.000,00 | 190.000.000,00 | |
| 5.01.01.2 .07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 4 Unit | 190.000.000,00 | 190.000.000,00 | DAU |
| 5.01.01.2 .08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 1 Paket | 260.092.170,00 | 260.092.170,00 | |
| 5.01.01.2 .08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1500 Laporan | - | - | DAU |
| 5.01.01.2 .08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 194.092.170,00 | 194.092.170,00 | DAU |
| 5.01.01.2 .08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 66.000.000,00 | 66.000.000,00 | DAU |
| 5.01.01.2 .09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Tersedianya Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik untuk Mendukung Urusan Pemerintahan | | 30 Unit | 502.040.000,00 | 502.040.000,00 | |
| 5.01.01.2 .09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 28 Unit | 240.000.000,00 | 240.000.000,00 | DAU |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------------|------------------------------|-----|
| | 5.01.01.2 .09.0009 | Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 2 Unit | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 | DAU |
| | 5.01.01.2 .09.0011 | Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 7 Unit | 102.040.000,00 | 102.040.000,00 | DAU |
| 2 | 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN , PENGENDALIA N DAN EVALUASI PEMBANGUNA N DAERAH | <i>Persentase efektifitas capaian sasaran pembangu n</i> | | | 90% | 1.917.980.000,00 | 1.917.980.000, 00 | |
| | | | Persentase usulan yang diakomodir didokumen perencanaan | | | 92% | | | |
| | 5.01.02.2 .01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu | | 2 Dokumen | 1.670.480.000,00 | 1.670.480.000, 00 | |
| | 5.01.02.2 .01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | | | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | 1 Berita Acara | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | DAU |
| | 5.01.02.2 .01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | | | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 3 Berita Acara | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | DAU |
| | 5.01.02.2 .01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kot a | | | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | 1 Berita Acara | 380.000.000,00 | 380.000.000,00 | DAU |
| | 5.01.02.2 .01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kot a | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RK PD) | 2 Dokumen | 1.080.480.000,00 | 1.080.480.000,0 0 | DAU |
| | 5.01.02.2 .02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | Tersedianya Laporan Analisis Data dan Infomasi Pemerintahan Daerah Untuk Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah | | 1 Dokumen | 00,00 | 00,00 | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|--|---|--|---|------------|-------------------------|-------------------------|-----|
| | 5.01.02.2 .02.0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | | | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi | 48 Orang | 0,00 | 0,00 | DAU |
| | 5.01.02.2 .03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | Prosentase Ketercapaian Kinerja OPD | | 90% | 197.500.000,00 | 197.500.000,00 | |
| | 5.01.02.2 .03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | 1 Laporan | 53.907.600,00 | 53.907.600,00 | DAU |
| | 5.01.02.2 .03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 2 Laporan | 143.592.400,00 | 143.592.400,00 | DAU |
| | 5.01.02.2 .04 | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | | Prosentase Data yang di Rilis Tepat Waktu | | 90% | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | |
| | 5.01.02.2 .04.0001 | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | | | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | DAU |
| | 5.01.02.2 .04.0002 | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | | | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | 1 Dokumen | - | - | DAU |
| 3 | 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | <i>Persentase keselarasan dokumen perencanaan</i> | | | 92% | 1.481.586.180,00 | 1.481.586.180,00 | |
| | 5.01.03.2 .01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | | 2 Dokumen | 631.586.180,00 | 631.586.180,00 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|---|--|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 5.01.03.2 .01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | 83.786.180,00 | 83.786.180,00 | DAU |
| 5.01.03.2 .01.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 1 Laporan | 26.650.000,00 | 26.650.000,00 | DAU |
| 5.01.03.2 .01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | Pajak Rokok |
| 5.01.03.2 .01.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 1 Laporan | 21.150.000,00 | 21.150.000,00 | DAU |
| 5.01.03.2 .01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | 1 Laporan | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | Pajak Rokok |
| 5.01.03.2 .02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | | Tersedianya Dokumen Perencanaan dan SDA yang Mengakomodir Usulan Strategis | | 1 Dokumen | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|---|-----------|----------------|----------------|-----|
| 5.01.03.2 .02.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 2 Dokumen | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | DAU |
| 5.01.03.2 .02.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 1 Laporan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | DAU |
| 5.01.03.2 .02.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 1 Laporan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | DAU |
| 5.01.03.2 .02.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | DAU |
| 5.01.03.2 .02.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 1 Laporan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | DAU |
| 5.01.03.2 .02.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 1 Laporan | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | DAU |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|---|--|--|-------------|------------------|------------------|-----|
| | 5.01.03.2 .03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | Tersedianya Dokumen Perencanaan lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan yang Mengakomodir Usulan Stratgeis | | 1 Dokumen | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 | |
| | 5.01.03.2 .03.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd) | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD.RPJMD dan RKPd) | 1 Dokumen | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | DAU |
| | 5.01.03.2 .03.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | DAU |
| | 5.01.03.2 .03.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd) | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPd) | 200 Dokumen | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | DAU |
| | 5.01.03.2 .03.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan PerangkatDaerah Bidang Kewilayahan | 1 Laporan | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | DAU |
| | 5.05 | PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN | | | | | 875.000.000,00 | 875.000.000,00 | |
| 4 | 5.05.02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH | <i>Persentase hasil kajian penelitian dan pengembang an daerah yang dimanfaatka n/ ditindaklanju ti</i> | | | 90% | 1.382.500.000,00 | 1.382.500.000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--|--|---|---|-----------|----------------|----------------|-----|
| | 5.05.02.2 .01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | | Presentasi Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah yang Dilaksanakan | | 90% | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | |
| | 5.05.02.2 .01.0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | | | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik | 3 Laporan | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | DAU |
| | 5.05.02.2 .02 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | | Prosentase Kajian Penelitian dan Pengembangan daerah Bidang Sosial dan Kependudukan yang dilaksanakan | | 90% | 407.500.000,00 | 407.500.000,00 | |
| | 5.05.02.2 .02.0001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | 4 Dokumen | 407.500.000,00 | 407.500.000,00 | DAU |
| | 5.05.02.2 .03 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | | Prosentase Kajian Penelitian dan pengembangan daerah Bidang Ekonomi dan Pengembangannya dilaksanakan | | 90% | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | |
| | 5.05.02.2 .03.0004 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | 1 Dokumen | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | DAU |
| | 5.05.02.2 .04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | Prosentase OPD yang mengirim Inovasi | | 100% | 650.000.000,00 | 650.000.000,00 | |
| | 5.05.02.2 .04.0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 1 Dokumen | 650.000.000,00 | 650.000.000,00 | DAU |
| 5. | 5.05.03 | PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH | Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|---|-----------|---|---|--|
| | 5.05.03.2.02 | Invensi dan Inovasi | | Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Pembinaan Inovasi Daerah Sesuai Rencana | | | | | |
| | 5.05.03.2.02.0001 | Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah | | | Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah | 1 Laporan | - | - | |
| | 5.05.03.2.02.0002 | Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi | | | Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Promosi dan Kampanye Inovasi | 1 Laporan | - | - | |

BAB V PENUTUP

Pembangunan berorientasi pada masyarakat artinya adalah bahwa hasil pembangunan yang akan dicapai tersebut akan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, selain itu resiko atau cost yang akan ditimbulkan oleh upaya pembangunan juga akan ditanggung oleh masyarakat. Dengan Demikian, tidak hanya benefit yang harus diketahui semenjak program pembangunan direncanakan, tetapi juga cost-nya.

Rencana Kerja ini disusun disamping sebagai upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan di tahun 2026, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dari Bapperida, dan juga jumlah dana yang diperlukan jika perencanaan tersebut dilaksanakan.

Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ponorogo, Agustus 2025

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Ponorogo



Dr. Agus Sugiarto, M.Si
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 196804131988091002